

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 139 /PK/2019

Tanggal : 26 Maret 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SORONG
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Kode Daerah: 3203

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>VI. Tarif Pemakaian Sewa Gedung ACC (Aimas Convention Center) ditetapkan per hari sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan/Instansi Pemerintah sebesar Rp.40.000.000,00.- 2. Organisasi Sosial, Organisasi Massa/Partai Politik sebesar Rp.25.000.000,00.- 3. Organisasi Keagamaan sebesar Rp.20.000.000,00.- 4. Perorangan sebesar Rp.30.000.000,00.- 	<p>Ketentuan Pasal 8 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>VI. Tarif Pemakaian Gedung ACC (Aimas Convention Center) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan/Instansi Pemerintah sebesar Rp.40.000.000,00.- per hari 2. Organisasi Sosial, Organisasi Massa/Partai Politik sebesar Rp.25.000.000,00.- per hari 3. Organisasi Keagamaan sebesar Rp.20.000.000,00.- per hari 4. Perorangan sebesar Rp.30.000.000,00.- per hari 	Legal drafting disempurnakan.
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	- -	- -	- -

1
AP

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 26 Maret 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Lisbon Sirait
Lisbon Sirait